

## EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS KECAMATAN PARENGGEAN

Aulia Rahmah<sup>1)\*</sup>, Iwan Yuwindry<sup>2)</sup>, Risyda Komaliya<sup>2)</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Kesehatan, Universitas Sari Mulia, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Kesehatan, Universitas Sari Mulia, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

### Info Artikel

Submitted: 07-10-2024

Revised: 07-11-2024

Accepted: 20-11-2024

\*Corresponding author  
Aulia Rahmah

Email:  
auliarahmahreal@gmail.com

DOI:10.33859/jpcs.v5i1.644

### ABSTRAK

**Latar belakang:** Sebagian daerah pedalaman sering kali menghadapi tantangan tersendiri dalam hal akses dan kualitas pelayanan kefarmasian, peran apoteker maupun tenaga kefarmasian di Puskesmas masih menjadi pertanyaan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan pelayanan kefarmasian di Puskesmas di tempat asal peneliti yaitu Puskesmas di Kecamatan Parenggean.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk Mengobservasi secara mendalam mengenai penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Parenggean I dan Puskesmas Parenggean II berdasarkan Permenkes RI nomor 74 tahun 2016 dan Permenkes RI nomor 26 tahun 2020.

**Metode:** Metode yang digunakan yaitu observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung kepada Apoteker dengan penyerahan lembar observasi yang berisi pertanyaan untuk mendapatkan informasi mengenai Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis habis Pakai, Pelayanan Farmasi Klinik, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.

**Hasil:** Terdapat dua Puskesmas yang berada di Kecamatan Parenggean. Semua puskesmas telah menerapkan Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan Permenkes nomor 74 tahun 2016, namun dalam aspek Pelayanan Farmasi Klinik belum sepenuhnya dilakukan seperti visite pasien karena di dua Puskesmas tersebut tidak memiliki ruang rawat inap.

**Simpulan:** Pelayanan kefarmasian di Puskesmas Parenggean I mencapai 96% dan Puskesmas Parenggean II mencapai 100% sesuai dengan Permenkes nomor 74 tahun 2016 dan Permenkes nomor 26 tahun 2020. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan kedua Puskesmas telah sesuai standar dengan kategori baik dalam melakukan pelayanan kefarmasian di wilayah kerjanya.

Abstrak ditulis dengan maksimal sebanyak 250 kata.

**Kata Kunci:** Kecamatan Parenggean, Pelayanan Kefarmasian, Puskesmas

### ABSTRACT

**Background:** Some remote areas often face their own challenges in terms of access and quality of pharmaceutical services, the role of pharmacists and pharmaceutical personnel in the Community Health Center is still a question. Based on this, the researcher is very interested in knowing how the implementation of pharmaceutical services in the Community Health Center in the researcher's place of origin, namely the Community Health Center in Parenggean District.

**Objective:** The purpose of this study is to observe in depth the implementation of pharmaceutical service standards at the Parenggean I Health Center and the Parenggean II Health Center based on the Indonesian Minister of Health

Regulation number 74 of 2016 and the Indonesian Minister of Health Regulation number 26 of 2020.

**Methods:** The methods used were observation and in-depth interviews conducted directly with pharmacists by submitting observation sheets containing questions to obtain information regarding the Management of Pharmaceutical Preparations and Disposable Medical Materials, Clinical Pharmacy Services, Human Resources and Facilities and Infrastructure.

**Results:** There are two Health Centers in Parenggean District. All health centers have implemented the Management of Pharmaceutical Supplies and Disposable Medical Materials in accordance with Permenkes number 74 of 2016, but in terms of Clinical Pharmacy Services, it has not been fully implemented such as patient visits because the two Health Centers do not have inpatient rooms.

**Conclusion:** Pharmaceutical services at Parenggean I Health Center reached 96% and Parenggean II Health Center reached 100% in accordance with Minister of Health Regulation number 74 of 2016 and Minister of Health Regulation number 26 of 2020. These values indicate that overall both Health Centers have met the standards with a good category in providing pharmaceutical services in their working areas.

**Keywords:** Parenggean District, Pharmaceutical Services, Primary Health Center

## PENDAHULUAN

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi. Namun, sebagian daerah pedalaman sering kali menghadapi tantangan tersendiri dalam hal akses dan kualitas pelayanan kefarmasian, peran apoteker maupun tenaga kefarmasian di Puskesmas masih menjadi pertanyaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Robiyanto et al., tahun 2019 di Puskesmas wilayah Kota Pontianak, bahwa dari 22 puskesmas di Kota Pontianak hanya 27,3% Puskesmas yang memiliki Apoteker. Terdapat kesenjangan antara pelayanan kefarmasian yang ideal sesuai standar dengan keadaan yang terjadi di lapangan, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap mutu pelayanan, tingkat kepuasan bahkan keselamatan pasien jika terjadi penggunaan obat yang tidak rasional (Badu et al., 2022).

Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2020. Standar ini digunakan sebagai pedoman bagi petugas kefarmasian di Puskesmas sebagai parameter pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas guna meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum serta melindungi pasien dan masyarakat dalam keselamatan pasien (*patient oriented*) (Kemenkes RI, 2020).

Penelitian di dua Puskesmas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa persentase pada aspek pelayanan farmasi klinik dikedua Puskesmas tersebut sebesar 30%, di mana nilai tersebut masih belum mencapai standar, hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang belum memadai termasuk juga pada pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat tidak selalu dilakukan (Lesta, 2021).

Kecamatan Parenggean merupakan wilayah yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana kecamatan Parenggean terdapat dua Puskesmas yaitu Puskesmas Parenggean I dan Puskesmas Parenggean II. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Parenggean I dan Puskesmas Parenggean II

sesuai standar yang berlaku. Penelitian ini dilakukan karena belum terdapat penelitian terdahulu terkait penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas kecamatan Parenggean, sehingga penelitian ini mengkaji sejauh mana kegiatan pelayanan kefarmasian di kedua Puskesmas tersebut.

## METODE

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian observasional, menggunakan metode deskriptif dengan cara pengisian lembar observasi dan wawancara secara mendalam. Data yang didapatkan kemudian dianalisa dengan cara deskriptif serta akan diuraikan dalam bentuk kata-kata. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Parenggean I dan Puskesmas Parenggean II Kecamatan Parenggean.

### Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 2 orang responden, yaitu Apoteker penanggung jawab ruang farmasi Puskesmas Parenggean I dan Puskesmas Parenggean II.

### Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini berupa lembar observasi yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Sebagai alat penunjang berupa alat tulis, alat perekam dan kamera untuk dokumentasi.

### Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik setiap variabel mengenai standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP), pelayanan farmasi klinik, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di Puskesmas Parenggean I dan Puskesmas Parenggean II.

### Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data akan dilakukan editing, coding, scoring, tabulating, entry dan cleaning. Berikut ini proses pengolahan data (Badu et al., 2022):

- Data dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan kelengkapannya
- Data pada lembar observasi dihitung menggunakan skala guttman, untuk jawaban sesuai "Ya" akan diberi skor penilaian 1 dan jawaban tidak sesuai "Tidak" akan diberi skor penilaian 0.
- Data disajikan kedalam bentuk tabel untuk menunjukkan frekuensi kejadian dan persentase kategori yang berbeda didalam komputer.
- Data akan dihitung ke dalam bentuk persentase (%) Berdasarkan jawaban sebuah pertanyaan, untuk melihat adanya keselarasan dari responden sehingga akan digunakan kriteria absolute:

$$P = \frac{a}{b} 100\%$$

Keterangan :

P : persentase

a : jumlah pertanyaan benar

b : jumlah semua pertanyaan

- Dilakukan perhitungan nilai rata-rata unsur layanan kefarmasian dalam kedua Puskesmas:

$$P = \frac{(a+b)}{2} 100\%$$

Keterangan:

a: Puskesmas Parenggean I

b: Puskesmas parenggean II

f. Kriteria persentase yaitu sebagai berikut:

1. Kategori baik,  $\geq 76-100\%$  (benar)
2. Kategori cukup,  $60-75\%$  (benar)
3. Kategori kurang,  $\leq 60\%$  (benar)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Karakteristik Responden

Tabel 1 Karakteristik responden

Informasi Demografi		Jumlah	Persentase
Total Responden		2	100%
Jenis Kelamin	Laki-laki	1	50%
	Perempuan	1	50%
Pendidikan Terakhir	Pascasarjana/Profesi	2	100%
Usia	30-40 tahun	2	100%
Tempat Tinggal	Bersama keluarga inti	2	100%
Lama bekerja	1-3 tahun	2	100%

Puskesmas parenggean I

Hasil penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Parenggean I

Tabel 2 Hasil Wawancara Pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP Puskesmas Parenggean I

No	Aspek	Hasil wawancara
1	Perencanaan	Perencanaan kebutuhan dilakukan setiap satu tahun sekali, dengan metode kombinasi epidemiologi dan konsumsi, proses seleksi berdasarkan Fornas dan DOEN.
2	Pengadaan	Pengadaan di Puskesmas dengan cara permintaan ke Dinkes Kab/Kota dan pengadaan mandiri dengan cara pembelian
3	Penerimaan	Penerimaan barang dilakukan pengecekan yang utama yaitu cek tanggal kadaluwarsa dan nomor batch, setelah itu penyesuaian jumlah, bentuk, jenis dengan dokumen LPLPO
4	Penyimpanan	Penyimpanan berdasarkan FIFO, FEFO dan LIFO, berdasarkan golongan, jenis sediaan dll.
5	Pendistribusian	Penyerahan obat ke sub unit sesuai kebutuhan berdasarkan LPLPO sub unit, penyerahan ke jaringan sesuai kebutuhan Pustu
6	Pelaporan	Pelaporan di Puskesmas kami meliputi pelaporan pengeluaran dan pemasukan, pelaporan psikotropika narkotika yang selalu dicatat apabila terjadi pengeluaran, pelaporan obat hilang/rusak/kadaluwarsa dan pelaporan lainnya.
7	Pengendalian	Pencatatan seluruh kegiatan administrasi direkap dan diarsipkan untuk dibuat evaluasi

Tabel 3 Hasil Wawancara Pelayanan Farmasi Klinik Puskesmas Parenggean I

No	Aspek	Hasil Wawancara
1	Pengkajian dan	Pengkajian meliputi administrasi, farmasetik dan klinis, penyerahan obat disertai informasi yang jelas dan dokumentasi

		pelayanan resep
2	PIO	PIO kepada pasien, dokter dan tenaga kesehatan lain, PIO menggunakan media layer TV. Belum pernah penyuluhan ke Masyarakat terkait obat.
3	Konseling	Konseling diloket obat, tidak melakukan <i>home pharmacy care</i>
4	MESO	Menganalisis laporan ESO, identifikasi pasien maupun obat yang bersangkutan.
5	PTO dan EPO	PTO dan EPO dilakukan secara berkala, dilakukan terhadap pasien dengan kriteria khusus

Tabel 4 Hasil Observasi SDM Puskesmas Parenggean I

Sumber Daya Manusia	Puskesmas Parenggean I memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab ruang farmasi, mengikuti pelatihan kompetensi,
---------------------	--

Tabel 5 Hasil Observasi Sarana Prasarana Puskesmas Parenggean I

Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana pelayanan kefarmasian di Puskesmas Parenggean I terdiri dari ruang penerimaan resep, ruang pelayanan resep dan peracikan, ruang penyerahan obat, ruang penyimpanan obat dan BMHP dan ruang konseling
----------------------	---

Tabel 6 Pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP Puskesmas Parenggean I

No	Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	Jumlah kesesuaian	Persentase (%)
1	Ya	7	100
2	Tidak	0	0
<b>Jumlah Indikator</b>		7	100

Tabel 7 Pelayanan Farmasi Klinik Puskesmas Parenggean I

No	Pelayanan Farmasi Klinik	Jumlah kesesuaian	Persentase (%)
1	Ya	22	91
2	Tidak	2	9
<b>Jumlah seluruh pertanyaan</b>		24	100

Tabel 8 Sumber Daya Manusia Puskesmas Parenggean I

No	Sumber Daya Manusia	Jumlah kesesuaian	Persentase (%)
1	Ya	4	100
2	Tidak	0	0
<b>Jumlah seluruh pertanyaan</b>		4	100

Tabel 9 Sarana dan Prasarana Puskesmas Parenggean I

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah kesesuaian	Persentase (%)
1	Ya	33	93
2	Tidak	2	7
<b>Jumlah seluruh pertanyaan</b>		35	100

## Puskesmas Parenggean II

### Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Parenggean II

Tabel 10 Hasil Wawancara Pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP Puskesmas Parenggean II

No	Aspek	Hasil wawancara
1	Perencanaan	Perencanaan kebutuhan dilakukan setiap satu tahun sekali, dengan metode kombinasi epidemiologi dan konsumsi, proses seleksi berdasarkan Fornas dan DOEN.

2	Pengadaan	Pengadaan di Puskesmas dengan cara permintaan ke Dinkes Kab/Kota. Pengadaan ini berdasarkan LPLPO yang sesuai dengan perencanaan.
3	Penerimaan	Penerimaan barang dilakukan pengecekan yang utama yaitu cek tanggal kadaluwarsa dan nomor batch, setelah itu penyesuaian jumlah, bentuk, jenis dengan dokumen LPLPO
4	Penyimpanan	Penyimpanan berdasarkan FIFO, FEFO, yang utama yaitu memperhatikan stabilitas suhu ruang penyimpanan berdasarkan golongan, jenis dan bentuk sediaan
5	Pendistribusian	Penyerahan obat ke sub unit sesuai kebutuhan berdasarkan LPLPO sub unit, penyerahan ke jaringan sesuai LPLPO kebutuhan Pustu
6	Pelaporan	Pelaporan di Puskesmas Parenggean II meliputi pelaporan pengeluaran dan pemasukan, pelaporan psikotropika narkotika yang selalu dicatat apabila terjadi pengeluaran, pelaporan obat hilang/rusak/kadaluwarsa dan pelaporan lainnya.
7	Pengendalian	Pencatatan seluruh kegiatan administrasi direkap dan diarsipkan untuk dibuat evaluasi

Tabel 11 Hasil Wawancara Pelayanan Farmasi Klinik Puskesmas Parenggean II

No	Aspek	Hasil Wawancara
1	Pengkajian dan pelayanan resep	Pengkajian meliputi adminiftrasi, farmasetik dan klinis, penyerahan obat disertai informasi yang jelas dan dokumentasi
2	PIO	PIO kepada pasien, dokter dan tenaga kesehatan lain, PIO menggunakan postr dan leaflet kepada pasien tertentu. Penyuluhan dilakukan dengan cara ikut dalam program Puskesmas
3	Konseling	Konseling diruang obat, dilakukan pada pasien sesuai kriteria. Pelayanan <i>home pharmacy care</i> dilakukan pada pasien TB dan pernah pada pasien Covid 19
4	MESO	Menganalisis laporan ESO, identifikasi pasien maupun obat yang bersangkutan.
5	PTO dan EPO	PTO dan EPO dilakukan secara berkala, dilakukan terhadap pasien dengan kriteria khusus

Tabel 12 Hasil Observasi SDM Puskesmas Parenggean II

Sumber Manusia	Daya	Puskesmas Parenggean II memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab ruang farmasi, mengikuti pelatihan kompetensi,
----------------	------	---

Tabel 13 Hasil Obseervasi Sarana Prasarana Puskesmas Parenggean II

Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana pelayanan kefarmasian di Puskesmas Parenggean II terdiri dari ruang penerimaan resep, ruang pelayanan resep dan peracikan, ruang penyerahan obat, ruang penyimpanan obat dan BMHP dan ruang konseling
----------------------	--

Tabel 14 Pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP Puskesmas Parenggean II

No	Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	Jumlah kesesuaian	Persentase (%)
1	Ya	7	100
2	Tidak	0	0
<b>Jumlah Indikator</b>		7	100

Tabel 15 Pelayanan Farmasi Klinik Puskesmas Parenggean II

No	Pelayanan Farmasi Klinik	Jumlah kesesuaian	Persentase (%)
1	Ya	24	100
2	Tidak	0	0



<b>Jumlah seluruh pertanyaan</b>	24	100
----------------------------------	----	-----

Tabel 16 Sumber Daya Manusia Puskesmas Parenggean II

No	Sumber Daya Manusia	Jumlah kesesuaian	Persentase (%)
1	Ya	4	100
2	Tidak	0	0
<b>Jumlah seluruh pertanyaan</b>		4	100

Tabel 17 Sarana dan Prasarana Puskesmas Parenggean II

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah kesesuaian	Persentase (%)
1	Ya	35	100
2	Tidak	0	0
<b>Jumlah seluruh pertanyaan</b>		35	100

## Pembahasan

Penelitian ini melakukan triangulasi metode dan triangulasi teori bertujuan ini untuk menguji keabsahan data narasumber mengenai standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Parenggean yaitu Puskesmas Parenggean I dan Puskesmas Parenggean II. Peneliti menggunakan triangulasi metode dengan cara melakukan wawancara mendalam, observasi maupun penelusuran dokumen. Peneliti melakukan triangulasi teori dengan cara menganalisis antara perspektif narasumber dengan perspektif teori untuk melihat kesesuaian hasil. Berdasarkan wawancara mendalam yang telah dilakukan, berikut ini pembahasan mengenai penerapan standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Puskesmas Parenggean I dan Puskesmas Parenggean II:

### Puskesmas Parenggean I

#### Pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP

Peneliti melakukan observasi dan wawanca mendalam mengenai indikator pada tabel 2. Dapat diketahui bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP yang mencakup Perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribsian, pelaporan serta pengendalian yang dilakukan oleh Puskesmas Parenggean I telah 100% sesuai dengan standar yang diatur oleh Permenkes nomor 74 tahun 2016.

#### Pelayanan Farmasi Klinik

Pelayanan farmasi klinik di Puskesmas Parenggean I pada tabel 3 menunjukkan bahwa penerapan tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Yaitu pada indikator PIO, Puskesmas Parenggean I belum pernah melakukan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Pada indikator konseling, Puskesmas Parenggean I belum pernah melakukan home pharmacy care. Sehingga dapat diketahui bahwa pelayanan kefrmasian di Puskesmas Parenggean I telah menerapkan aspek pelayanan farmasi klinik mencapai 91% terhadap Permenkes nomor 74 tagun 2016.

#### Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada tabel 4 berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa Puskesmas Parenggean I memiliki Apoteker penanggung jawab ruang <https://ejurnal.unism.ac.id/index.php/jpcs>

farmasi dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian (TTK), Adapun kesesuaian penerapan sebesar 100% dengan Permenkes nomor 26 tahun 2020.

#### Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pada tabel 5 menunjukkan bahwa hasil observasi di Puskesmas Parenggean I telah sesuai 93% dengan Permenkes nomor 74 tahun 2016. Terdapat 2 item penunjang sarana prasarana yang tidak terdapat pada fasilitas Puskesmas yaitu timbangan obat diruang pelayanan resep dan peracikan dan leaflet diruang konseling karena tidak diperlukan dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas Parenggean I.

### **Puskesmas Parenggean II**

#### Pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP

Peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam mengenai indikator pada tabel 6. Dapat diketahui bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP yang mencakup Perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pelaporan serta pengendalian yang dilakukan oleh Puskesmas Parenggean I telah 100% sesuai dengan standar yang diatur oleh Permenkes nomor 74 tahun 2016.

#### Pelayanan Farmasi Klinik

Observasi mengenai pelayanan farmasi klinik pada tabel 7 menunjukkan bahwa Puskesmas Parenggean II telah melaksanakan pelayanan farmasi klinik sebesar 100% sesuai dengan Permenkes nomor 74 tahun 2016.

#### Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada tabel 8 berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa Puskesmas Parenggean II memiliki Apoteker penanggung jawab ruang farmasi dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian (TTK), Adapun kesesuaian penerapan sebesar 100% dengan Permenkes nomor 26 tahun 2020.

#### Sarana dan prasarana

Sarana dan prasana pada tabel 9 menunjukkan bahwa hasil observasi di Puskesmas Parenggean II telah 100% sesuai dengan Permenkes nomor 74 tahun 2016. Dimana terdapat ruang penerimaan resep, pelayanan resep dan peracikan, penyerahan obat, penyimpanan obat dan BMHP serta ruang konsleing yang dilengkapi dengan item penunjang pada setiap ruangan.

Kesesuaian pelayanan kefarmasian di Puskesmas Parenggean I dan Puskesmas Parenggean II Terhadap Permenkes nomor 74 tahun 2016 dan Permenkes nomor 26 tahun 2020 pada tabel berikut:

Tabel 18 Kesesuaian PSPK Puskesmas Parenggean I dan Parenggean II

No.	Aspek	Puskesmas	
		P1	P2
1	Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP	100%	100%
2	Pelayanan farmasi klinis	91%	100%
3	Sumber daya manusia	100%	100%
4	Sarana dan prasarana	93%	100%
Persentase keseluruhan		96%	100%



Kategori baik dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan menurut Badu et al., (2022) adalah di atas 75%. Berdasarkan observasi dan wawancara secara mendalam, dapat dilihat bahwa hasil menunjukkan persentase Puskesmas Parenggean I sebesar 96% dan Puskesmas Parenggean II sebesar 100%, sehingga rata-rata pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Parenggean mencapai 98% terhadap standar Permenkes nomor 74 tahun 2016 dan Permenkes nomor 24 tahun 2020. Dari nilai tersebut diketahui Puskesmas di Kecamatan Parenggean dikategorikan baik, hal ini karena Puskesmas Kecamatan Parenggean selalu melaksanakan akreditasi khususnya pada manajemen pelayanan kefarmasian.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Kecamatan Parenggean telah menerapkan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permenkes nomor 74 tahun 2016 dan Permenkes nomor 26 tahun 2020, yaitu Puskesmas Parenggean I didapatkan sebesar 96%, terdapat 4% ketidaksesuaian ada pada aspek home pharmacy care yang belum pernah dilaksanakan, dan Puskesmas Parenggean II didapatkan sebesar 100%. Terdapat Dalam hal itu, nilai tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan kedua Puskesmas telah sesuai standar dengan kategori baik dalam melakukan pelayanan kefarmasian di wilayah kerjanya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada penulis kedua dan penulis ketiga yang telah memberikan tenaga dan pikiran dalam penyelesaian artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2019). *Mutu Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas* (T. Yulianti, Ed.). Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Anita, B., Febriawati, H., & Yandrizal. (2019). *Puskesmas Dan Jaminan Kesehatan Nasional*. Deepublish.
- Aprianto, B., & Zuchri, F. N. (2021). Implementasi manajemen sumber daya manusia kesehatan di fasilitas kesehatan: A Literature Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(3), 160–166.
- Arianti, S. W., Permata, A., Salmasfattah, N., & Tnesi, M. T. (2023). Monitoring Efek Samping Obat Antituberkulosis terhadap Pasien Tuberkulosis Paru di Rumah Sakit X Malang. *Indonesian Journal of Pharmaceutical Education*, 3(3).
- Badu, A. S., astuty Lolo, W., & Jayanto, I. (2022). Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *PHARMACON*, 11(3), 1556–1565.
- Chusna, N., Fetriana, T., & Adawiyah, R. (2018). Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Pahandut Kota Palangka Raya. *Borneo Journal of Pharmacy*, 1(2). <https://journal.umpr.ac.id/index.php/bjop/article/view/379/361>
- Dianita, P. S., Kusuma, T. M., & Septianingrum, N. M. A. N. (2017). Evaluasi penerapan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas kabupaten Magelang berdasarkan Permenkes RI no. 74 tahun 2016. *URECOL*, 125–134.
- Hakim, A. R., & Saputri, R. (2021). *Metode Penelitian Kesehatan*. CV. Pena Persada.

- Kemenkes RI. (2019a). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)
- Kemenkes RI. (2019b). Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/114629/permenkes-no-74-tahun-2016>
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian DI Puskesmas. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163004/permenkes-no-26-tahun-2020>
- Khoirin, K., Ramadhiani, A. R., & Rosita, M. (2022). Hubungan Pelayanan Informasi Obat Terhadap Kepuasan Pasien. *Jurnal'Aisyiyah Medika*, 7(2).
- Lesta, F. F. (2021). Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Semanggang Dan Puskesmas Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Permenkes RI NO. 26 Tahun 2020.
- Lolita, D. (2019). Penerapan Pelayanan Farmasi Klinis Di RSUD Ade Muhammad Djoen Kabupaten Sintang Tahun 2018 berdasarkan Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016. *Jurnal Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran UNTAN*, 4(1).
- Megawaty, F., Kumala, S., & Keban, S. A. (2020). Evaluasi Pelayanan Pemantauan Terapi Obat di Rumah Sakit X Tangerang. *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 18(1), 28–33.
- Murni, N., Asriwati, & Nur'aini. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Terhadap Peningkatan Kepuasan Pasien. *Jurnal Kesmas Prima Indonesia*, Vol 2. <http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/JKPI/article/view/890/671>
- Rochman, A. F. (2020). *Evaluasi Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Wilayah Kota Batu Berdasarkan Permenkes NO.74 TAHUN 2016* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25639/2/16670061.pdf>
- Sugiyono. (2021) Metode Penelitian Pendidikan. Penerbit Alfabeta.
- Suprihartini, B. E., Radiah, N., & Hidayat, M. W. (2022). Evaluasi penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. *Sasambo Journal of Pharmacy*, 3(1), 1–5.
- Verigin, B. L., Meijer, E. H., Bogaard, G., & Vrij, A. (2019). *Lie prevalence, lie characteristic and strategies of self-reported good liars*. *PLoS ONE*, 14(12), 1-16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225566>
- Winda, S. W. (2018). Formularium Nasional (FORNAS) dan e-Catalogue Obat Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Formularium Nasional (FORNAS) dan E-Catalogue Obat Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 177–206.